

LAPORAN HASIL SURVEI

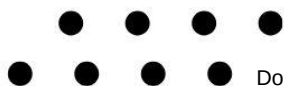
SPKP, SPAK dan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Periode Juli 2026

Disusun Oleh:

Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, mengharuskan instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017.

Selain itu sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka diperlukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. SPKP dan SPAK dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja instansi Pemerintah.

Pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM dilakukan terhadap 6 (enam) layanan yang ada di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yaitu (1) penyediaan baku pembanding kimia, (2) penyediaan baku mikroba, (3) uji profisiensi kimia, (4) uji profisiensi mikrobiologi dan biologi molekuler (5) pelatihan teknis laboratorium, dan (6) pengujian obat dan makanan.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai unit pelayanan publik melaksanakan SPKP dan SPAK dengan tujuan memberikan gambaran persepsi anti korupsi secara umum pada setiap Unit Kerja, memberikan gambaran persepsi pengguna layanan kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap Unit Kerja dan nilai hasil survei eksternal akan digunakan untuk memenuhi penilaian dalam komponen hasil pada Lembar Kerja Evaluasi ZI. Sedangkan pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala, bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik PPPOMN dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PPPOMN.

Laporan ini bertujuan memberikan gambaran umum pelayanan publik di PPPOMN yang ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di PPPOMN.

1.2. Dasar hukum

Dasar hukum pelaksanaan SPKP, SPAK, dan SKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.25/2009 tentang pelayanan publik. Pasal 38 yang berbunyi Penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala
2. PermenPAN RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBM di Instansi Pemerintah
4. ISO 9001:2015 yang diterapkan BPOM. Klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan
5. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.03.26.60 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan PPPOM

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM adalah:

1. Diketahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan Masyarakat
4. Diketahui indeks kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam Upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Manfaat bagi Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

1.4 Ruang lingkup

1. Periode pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat adalah 1 Juli s.d 31 Juli 2026
2. Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 6 (enam) layanan yang ada di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yaitu (1) penyediaan baku pembandingan kimia, (2) penyediaan baku mikroba, (3) uji profisiensi kimia, (4) uji profisiensi mikrobiologi dan biologi molekuler, (5) pelatihan teknis laboratorium, dan (6) pengujian obat dan makanan.

1.5 Sasaran, keluaran dan indikator keluaran

1. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kepuasan dan kepercayaan stakeholder terhadap layanan publik PPPOMN

2. Keluaran

Bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan

3. Indikator Keluaran

IPKP, IPAK, dan IKM (indeks kepuasan Masyarakat) terhadap layanan publik di PPPOMN

BAB II

METODOLOGI SURVEI

2. 1 Metodologi Survei

Pelaksanaan SPKP, SPAK, dan SKM di PPPOMN mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit penyelenggara pelayanan publik dan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.01.26.13 tentang pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2026. Metode survei adalah sebagai berikut :

1. Pertanyaan survei mencakup :
 - Persepsi kualitas pelayanan yaitu persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan sarana dan prasarana.
 - Persepsi anti korupsi yaitu aspek integritas, Tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.
2. Pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM adalah setiap bulan menggunakan link survei berbasis google drive dengan nama SIKEPO (Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Online) dengan link survei bit.ly/SurveiPPPOMN. Pelanggan layanan publik PPPOMN diminta untuk mengisi link tersebut setelah menerima layanan 100%. Isi survei SKM pelanggan PPPOMN mengadopsi dari template Survei Kepuasan Masyarakat dari Kemenpan RB.
3. Survei dilakukan secara *online* terhadap 6 layanan dengan memberikan link kepada responden masing-masing layanan sebagai berikut:
 - Penyediaan baku pembanding kimia : <https://bit.ly/skmbakupembanding>
 - Penyediaan baku mikroba : <https://bit.ly/skmbakumikroba>
 - Uji profisiensi kimia: <https://bit.ly/skmujiprofisiensikimia>
 - Uji profisiensi mikrobiologi dan biologi molekuler:
<https://bit.ly/ujiprofisiensimikrobiologidanbiomolekuler>
 - Pelatihan teknis laboratorium : <https://bit.ly/skmpelatihanteknislab>
 - Pengujian Obat dan Makanan : <https://bit.ly/skmpengujianpppomn>
4. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Persepsi Kualitas Pelayanan dipengaruhi oleh delapan variabel, yaitu:
 - a. Informasi Layanan;
 - b. Persyaratan Layanan;

- c. Prosedur Layanan;
- d. Jangka Waktu Layanan;
- e. Tarif/Biaya;
- f. Sarana Prasarana Layanan;
- g. Profesionalisme Petugas; dan
- h. Layanan Pengaduan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6 yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi kualitas pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

No.	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Persyaratan Layanan	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan?	1 s.d 6
2.	Prosedur Layanan	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?	1 s.d 6
3.	Jangka Waktu Layanan	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	1 s.d 6
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	Apakah menurut penilaian Saudara jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	1 s.d 6
5.	Jangka Waktu Respon Layanan	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?	1 s.d 6
6.	Tarif/Biaya	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan?	1 s.d 6

7.	Persyaratan Layanan	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kesesuaian produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	1 s.d 6
8.	Profesionalisme Petugas	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan?	1 s.d 6

5. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Persepsi Anti Korupsi dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu:

- Diskriminasi Layanan;
- Pelayanan Sesuai Dengan Prosedur;
- Penerimaan Imbalan;
- Pungutan Liar; serta
- Percaloan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin setuju dengan pernyataan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Hasil SPKP dan SPAK dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima”.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi anti korupsi sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Diskriminasi Layanan	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi	1 s.d 6
2.	Pelayanan Sesuai dengan Prosedur	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi Kecurangan	1 s.d 6

3.	Penerimaan Imbalan	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	1 s.d 6
4.	Pungutan Liar	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)	1 s.d 6
5.	Percaloan	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro	1 s.d 6

BAB III

ANALISIS HASIL SURVEI

1. Analisis hasil survei

a. IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)

Hasil SPKP pada bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut:

Bulan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	IPKP
Januari	3,94	3,78	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,89	3,85
Februari	3,78	3,96	3,91	3,87	3,82	3,91	3,87	3,91	3,88
Maret	3,94	3,82	3,82	3,94	3,82	3,88	3,82	3,82	3,86
April	3,84	3,89	3,86	3,88	3,86	3,88	3,88	3,88	3,87
Mei	3,86	3,90	3,82	3,89	3,83	3,86	3,84	3,86	3,86
Juni	3,91	3,88	3,83	3,77	3,77	3,80	3,83	3,74	3,82
Juli	3,86	3,90	3,90	3,86	3,81	3,86	3,86	3,90	3,87

Analisis:

Berdasarkan hasil pengolahan data survei pada periode Juli 2026, nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) di lingkungan PPPOMN tercatat sebesar 3,82 dari skala maksimal 4,00. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap berada pada kategori Sangat Baik, dengan tingkat stabilitas performa yang terjaga di berbagai lini operasional.

Analisis Per Indikator:

- Keunggulan Standar Layanan dan Kompetensi: Indikator Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan, dan Profesionalisme Petugas mencatatkan skor tertinggi, masing-masing sebesar 3,90. Hal ini merefleksikan apresiasi positif dari pengguna layanan terhadap efektivitas alur birokrasi, kepatuhan durasi layanan, serta integritas dan kecakapan petugas dalam menjalankan tugas.
- Stabilitas Persyaratan dan Pembiayaan: Aspek Persyaratan Layanan, Jangka Waktu Penyelesaian Layanan, serta Tarif/Biaya menunjukkan skor yang konsisten pada angka 3,86. Data ini mengindikasikan bahwa transparansi biaya serta kelengkapan administratif telah memenuhi ekspektasi publik dengan sangat baik.
- Akselerasi Waktu Respon: Indikator Jangka Waktu Respon Layanan berada pada angka 3,81. Meskipun masih dalam kategori yang sangat memuaskan, aspek ini menjadi titik observasi strategis bagi manajemen untuk terus meningkatkan kecepatan tanggap dalam melayani kebutuhan pengguna.

Kinerja pelayanan publik PPPOMN pada periode Juli 2026 menunjukkan kualitas yang

prima, didukung oleh keunggulan pada aspek prosedural dan profesionalisme petugas. Fokus strategis ke depan diarahkan pada penguatan kecepatan respon layanan guna mendorong peningkatan nilai indeks secara menyeluruh pada periode berikutnya.

b. IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)

Hasil SPAK pada bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut:

Bulan	P1	P2	P3	P4	P5	IPAK
Januari	4,00	3,94	4,00	4,00	4,00	3,99
Februari	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Maret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
April	3,94	3,94	3,92	3,92	3,92	3,93
Mei	3,94	3,93	3,91	3,93	3,93	3,93
Juni	3,91	3,94	3,94	3,94	3,91	3,93
Juli	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95

Analisis:

Berdasarkan pengolahan data survei pada periode Juli 2026, nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tercatat sebesar 3,95 dari skala maksimal 4,00. Capaian ini menempatkan unit layanan pada kategori Sangat Baik/Sangat Bersih, yang merefleksikan tingkat integritas yang sangat tinggi serta persepsi publik yang positif terhadap komitmen anti-korupsi di PPPOMN.

Analisis Per Indikator:

- **Keseragaman Integritas Sempurna:** Seluruh indikator penilaian—yakni Diskriminasi Layanan, Pelayanan Sesuai dengan Prosedur, Penerimaan Imbalan, Pungutan Liar, serta Percaloan—mencatatkan skor yang seragam dan sangat tinggi pada angka 3,95.
- **Keadilan dan Kepatuhan Prosedur:** Perolehan skor pada aspek diskriminasi dan kesesuaian prosedur menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan, serta berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi dan alur birokrasi yang telah ditetapkan.
- **Pencegahan Praktik Maladministrasi dan Gratifikasi:** Nilai yang merata pada aspek penerimaan imbalan, pungli, dan percaloan membuktikan bahwa sistem pengawasan internal dan budaya anti-korupsi di lingkungan kerja telah berjalan secara efektif dalam menutup seluruh celah penyimpangan serta praktik ilegal.

Performa integritas pada bulan Juli 2026 menunjukkan stabilitas yang sangat prima dengan tingkat keseragaman skor yang tinggi di setiap lini. Hasil ini menegaskan bahwa

komitmen bersama dalam menjaga kebersihan birokrasi dan pelayanan yang akuntabel telah terinternalisasi secara optimal. Fokus strategis ke depan adalah mempertahankan konsistensi pengawasan ini guna menjaga kepercayaan publik pada level tertingginya.

c. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Hasil SKM pada bulan Juli 2026 adalah sebagai berikut:

Bulan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM
Januari	98,61	98,61	95,83	97,22	97,22	98,61	98,61	95,83	95,83	97,38
Februari	96,67	94,44	98,15	98,89	97,78	97,78	97,78	96,67	95,56	97,08
Maret	98,48	98,48	95,45	95,45	95,45	96,97	100.00	98,48	95,45	97,14
April	98,06	96,12	97,03	96,51	96,90	98,84	98,84	96,90	96,51	97,30
Mei	96,81	96,45	96,93	98,58	97,16	97,87	97,87	97,16	95,74	97,18
Juni	96,38	97,83	96,62	96,38	96,38	97,10	97,87	97,16	95,74	97,18
Juli	97,62	96,43	97,62	97,62	96,43	97,62	97,62	96,43	95,24	96,96

Analisis:

Berdasarkan hasil pengolahan data survei kepuasan publik pada periode Juli 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 96,96. Capaian ini menempatkan performa pelayanan publik dalam kategori Sangat Baik, yang merefleksikan tingkat kepuasan dan pemenuhan ekspektasi pengguna layanan yang konsisten dan optimal.

Analisis Per Indikator:

- **Dominasi Kepuasan Pelayanan:** Sebagian besar indikator utama mencatatkan skor yang sangat tinggi dan seragam pada angka 97,62, meliputi Persyaratan, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Kompetensi Pelaksana, dan Perilaku Pelaksana. Data ini menunjukkan bahwa aspek kecepatan, kejelasan dokumen, transparansi biaya, serta kualitas sumber daya manusia merupakan pilar utama yang sangat diapresiasi oleh pengguna layanan.
- **Stabilitas Operasional dan Pengaduan:** Indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, serta Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan masing-masing memperoleh skor 96,43. Hasil ini mengindikasikan bahwa alur birokrasi, spesifikasi hasil layanan, dan sistem respons pengaduan telah berjalan secara efektif dan memadai.
- **Sarana Penunjang:** Indikator Sarana dan Prasarana mencatatkan skor 95,24. Meskipun berada pada kategori yang sangat memuaskan, angka ini merupakan yang terendah pada periode tersebut, sehingga menjadi poin observasi strategis bagi manajemen untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas fisik penunjang

pelayanan.

Pencapaian IKM sebesar 96,96 pada bulan Juli 2026 menunjukkan performa pelayanan publik yang sangat stabil dan prima. Kekuatan utama terletak pada kualitas SDM, transparansi biaya, dan ketepatan waktu penyelesaian yang konsisten memenuhi standar tinggi. Fokus strategis untuk periode selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada fasilitas sarana prasarana serta menjaga kestabilan indikator operasional lainnya guna mempertahankan kepuasan publik secara berkelanjutan.

2. Tindak Lanjut dan Evaluasi Saran dan Masukan

Rencana aksi, tindak lanjut hasil survey dan pemantauan/evaluasi terdapat pada Lampiran 2.

3. Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi hasil survey pelanggan pada bulan Juli 2026, maka dapat disimpulkan PPPOMN telah menerapkan pelayanan prima, pelayanan yang bersih dan akuntabel serta mutu pelayanan yang sangat baik.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Jakarta, 5 Agustus 2026
Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik PPPOMN



Cita Tri Aryuni, STP, S.Si, Apt.,M.Si

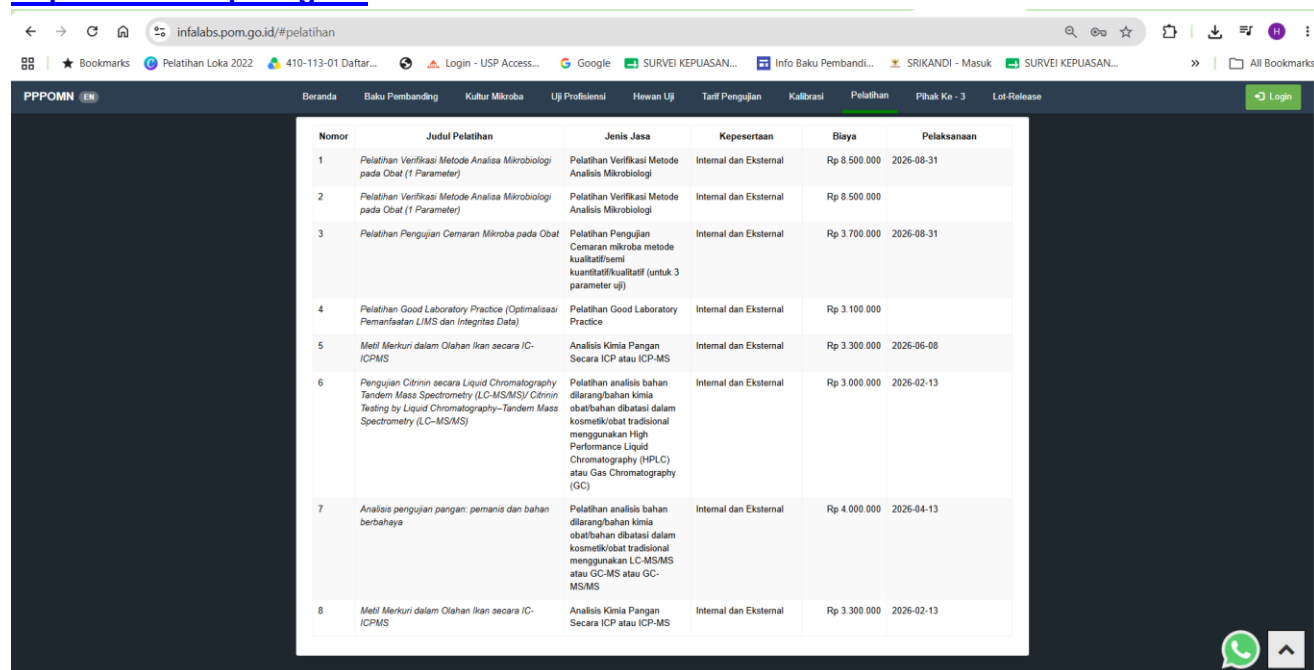
Lampiran 1. Data Responden

No	Tgl	Nama	Usia	Jenis Kelamin	No. Handphone	Pendidikan	Pekerjaan	Nama instansi/perusahaan tempat bekerja/beraktivitas
1	16/07/2026 13:55					S1	Pelajar /mahasiswa	
2	16/07/2026 13:57					S2/Profesi/S3	Pegawai swasta	
3	16/07/2026 14:00					≤ SMA/Sederajat	Pegawai swasta	
4	16/07/2026 14:04					≤ SMA/Sederajat	PNS/TNI/Polri	
5	16/07/2026 14:06					D1/D2/D3	Pegawai swasta	
6	16/07/2026 14:17					S1	Pelajar /mahasiswa	
7	20/07/2026 11:15					S2/Profesi/S3	Pegawai swasta	
8	20/07/2026 11:31					S2/Profesi/S3	PNS/TNI/Polri	
9	20/07/2026 11:34					S2/Profesi/S3	PNS/TNI/Polri	
10	20/07/2026 17:40					S1	Pelajar /mahasiswa	
11	20/07/2026 17:42					S2/Profesi/S3	Pegawai swasta	
12	20/07/2026 17:44					S1	Pelajar /mahasiswa	
13	20/07/2026 17:46					S1	PNS/TNI/Polri	
14	20/07/2026 17:47					S1	PNS/TNI/Polri	

Lampiran 2. Rencana Aksi/Tindak Lanjut Saran dan Masukan

No	Saran/masukan pelanggan	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Timeline	Penanggung Jawab
1	Semoga selalu mengadakan pelatihan terkait pengujian dengan isu-isu terkini dalam pangan	PPPOMN senantiasa menyelenggarakan pelatihan teknis pengujian secara berkala untuk berbagai komoditi guna memperbarui kompetensi terhadap metode dan isu-isu terkini. Informasi resmi terkait program pelatihan yang terbuka bagi peserta eksternal akan diumumkan secara berkala melalui situs web resmi dan media sosial PPPOMN.	2027	PPPOMM

Contoh Informasi Pelatihan yang Diselenggarakan PPPOMN yang dibuka di <https://infalabs.pom.go.id>



Nomor	Judul Pelatihan	Jenis Jasa	Kepesertaan	Biaya	Pelaksanaan
1	Pelatihan Verifikasi Metode Analisa Mikrobiologi pada Obat (1 Parameter)	Pelatihan Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi	Internal dan Eksternal	Rp 8.500.000	2026-08-31
2	Pelatihan Verifikasi Metode Analisa Mikrobiologi pada Obat (1 Parameter)	Pelatihan Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi	Internal dan Eksternal	Rp 8.500.000	
3	Pelatihan Pengujian Cemaran Mikroba pada Obat	Pelatihan Pengujian Cemaran mikroba metode kualitatif/semi kuantitatif/kualitatif (untuk 3 parameter uji)	Internal dan Eksternal	Rp 3.700.000	2026-08-31
4	Pelatihan Good Laboratory Practice (Optimalisasi Pemanfaatan LIMS dan Integritas Data)	Pelatihan Good Laboratory Practice	Internal dan Eksternal	Rp 3.100.000	
5	Metil Merkuri dalam Olahan Ikan secara IC-ICPMS	Analisis Kimia Pangan Secara ICP atau ICP-MS	Internal dan Eksternal	Rp 3.300.000	2026-06-08
6	Pengujian Citrinin secara Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)/ Citrinin Testing by Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)	Pelatihan analisis bahan dilarang/bahan kimia obat/bahan dibatasi dalam kosmetik/obat tradisional menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC) atau Gas Chromatography (GC)	Internal dan Eksternal	Rp 3.000.000	2026-02-13
7	Analisa pengujian pangan: pemanis dan bahan berbahaya	Pelatihan analisis bahan dilarang/bahan kimia obat/bahan dibatasi dalam kosmetik/obat tradisional menggunakan LC-MS/MS atau GC-MS atau GC-MS/MS	Internal dan Eksternal	Rp 4.000.000	2026-04-13
8	Metil Merkuri dalam Olahan Ikan secara IC-ICPMS	Analisis Kimia Pangan Secara ICP atau ICP-MS	Internal dan Eksternal	Rp 3.300.000	2026-02-13